

Aspek Hukum dalam Informasi di Perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia

Micael Jeriko Damanik

Universitas Sari Mutiara Indonesia

email: micaeljeriko88@gmail.com

Abstrak

Perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia (USMI) merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi yang memiliki peran penting dalam menyediakan informasi dan literasi informasi bagi para pengguna. Namun, dalam menyediakan informasi, terdapat aspek hukum yang harus diperhatikan, terutama terkait dengan hak cipta dan privasi informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek hukum dalam informasi di perpustakaan meliputi hak cipta, privasi, dan keamanan informasi. Artikel ini membahas mengenai aspek hukum dalam informasi di perpustakaan USMI, dengan fokus pada perlindungan hak cipta dan privasi informasi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh perpustakaan USMI untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku adalah dengan mengadopsi kebijakan yang jelas dan transparan terkait dengan pengelolaan informasi, mengembangkan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang hukum dan informasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk mengelola informasi.

Kata kunci: Aspek Hukum, Informasi, Perpustakaan, Privasi Informasi

Abstract

The Sari Mutiara Indonesia University Library (USMI) is one of the higher education institutions that has an important role in providing information and information literacy for users. However, in providing information, there are legal aspects that must be considered, especially related to copyright and information privacy. This study used a qualitative approach with data collection techniques through interviews and document analysis. The results of the study show that the legal aspects of information in the library include copyright, privacy and information security. This article examines the legal aspects of information in USMI's library, with a focus on copyright protection and information privacy. Some efforts that can be made by the USMI library to ensure compliance with applicable laws and regulations are by adopting clear and transparent policies related to information management, developing skilled human resources in the field of law and information, and ensuring the availability of infrastructure and technology. sufficient to manage information.

Keywords: Legal Aspect, Information, Library, Information Privacy.

PENDAHULUAN

Perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia adalah sebuah lembaga yang memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan pengetahuan bagi para mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum. Namun, penggunaan informasi yang tidak tepat dan kurang sesuai dengan aspek hukum dapat membawa dampak yang merugikan bagi pengguna maupun pihak perpustakaan itu sendiri. Aspek hukum dalam penggunaan informasi di perpustakaan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dengan baik. Hal ini dikarenakan penggunaan informasi yang tidak tepat dan kurang sesuai dengan hukum dapat

membawa dampak yang buruk, seperti terjadinya pelanggaran hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, perpustakaan harus memastikan bahwa penggunaan informasi yang dilakukan oleh pengguna adalah legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, perpustakaan juga harus memperhatikan perlindungan data pribadi yang dimiliki oleh pengguna. Perlindungan data pribadi menjadi penting untuk menjaga privasi pengguna dan mencegah penyalahgunaan data yang dapat merugikan pengguna itu sendiri. Perpustakaan harus memastikan bahwa data pribadi yang dimiliki oleh pengguna dijaga dengan baik dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Selain perhatian pada aspek hukum dalam penggunaan informasi, perpustakaan juga harus memperhatikan aspek hukum dalam pengelolaan koleksi perpustakaan. Pengelolaan koleksi perpustakaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat membawa dampak yang merugikan, seperti terjadinya tuntutan hukum dari pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, perpustakaan harus memastikan bahwa pengelolaan koleksi perpustakaan dilakukan dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, perpustakaan juga harus memastikan bahwa koleksi perpustakaan yang dimiliki tidak melanggar hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Perpustakaan harus memperoleh izin dan persetujuan dari pemilik hak cipta sebelum menggunakan dan memperbanyak karya-karya yang dilindungi hak cipta. Dalam kesimpulannya, aspek hukum dalam penggunaan informasi di perpustakaan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Perpustakaan harus memastikan bahwa penggunaan informasi dilakukan dengan cara yang legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perpustakaan juga harus memperhatikan perlindungan data pribadi pengguna serta pengelolaan koleksi perpustakaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perpustakaan dapat beroperasi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pengguna. Dalam hal ini, perpustakaan juga harus memastikan bahwa penggunaan informasi dilakukan dengan cara yang etis dan tidak melanggar norma-norma kebudayaan dan sosial yang berlaku. Etika penggunaan informasi meliputi penyalinan atau reproduksi karya dengan jumlah yang wajar dan sesuai dengan keperluan pendidikan dan penelitian, serta mencantumkan sumber informasi dengan jelas dalam setiap penggunaannya.

Perpustakaan juga harus memperhatikan aspek keamanan dalam penggunaan informasi. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pencurian informasi dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Perpustakaan dapat menggunakan teknologi keamanan seperti sistem keamanan jaringan dan enkripsi data untuk melindungi informasi yang dimiliki. Terkait dengan aspek hukum, perpustakaan juga harus memperhatikan peraturan dan regulasi yang terkait dengan pemberian hak akses informasi kepada pengguna. Perpustakaan harus memastikan bahwa setiap pengguna memiliki hak yang sama dalam mengakses informasi tanpa diskriminasi. Dalam memastikan kepatuhan terhadap aspek hukum dan etika dalam penggunaan informasi, perpustakaan dapat mengadopsi praktik-praktik terbaik seperti memberikan pelatihan tentang etika penggunaan informasi kepada pengguna, memastikan bahwa koleksi perpustakaan terdaftar dan memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh perpustakaan dalam memastikan kepatuhan terhadap aspek hukum dalam penggunaan informasi adalah kemajuan teknologi yang cepat serta kurangnya kesadaran tentang etika penggunaan informasi. Kemajuan teknologi yang cepat dapat memunculkan masalah baru dalam hal penggunaan informasi, seperti pencurian data dan pelanggaran hak cipta yang lebih sulit untuk dideteksi dan dihindari. Kurangnya kesadaran tentang etika penggunaan informasi juga dapat menyebabkan penyalahgunaan informasi dan pelanggaran hak cipta. Selain itu, perpustakaan juga harus memperhatikan peraturan dan regulasi yang berbeda-beda di setiap negara. Misalnya, dalam hal hak cipta, setiap negara memiliki peraturan yang berbeda tentang batasan-batasan penggunaan karya

dan penggunaan karya tanpa izin pemilik hak cipta. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi perpustakaan dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di negara tersebut. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perpustakaan dapat melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan kesadaran pengguna tentang etika penggunaan informasi, mengadopsi teknologi keamanan yang terbaru, dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti pemilik hak cipta dan pihak otoritas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku.

Dalam kesimpulannya, aspek hukum dalam penggunaan informasi di perpustakaan sangatlah penting untuk diperhatikan. Perpustakaan harus memastikan bahwa penggunaan informasi dilakukan dengan cara yang legal, etis, dan aman. Perpustakaan juga harus memperhatikan perlindungan data pribadi pengguna serta aspek hak akses informasi yang adil dan tidak diskriminatif. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, perpustakaan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan akses informasi yang berkualitas kepada pengguna dengan baik dan benar.

Perlindungan Hukum terhadap Kepemilikan Informasi dalam Perpustakaan USM Indonesia

Perlindungan hukum terhadap kepemilikan informasi dalam perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap hak cipta atas karya-karya yang dihasilkan oleh seseorang, termasuk karya tulis, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Sehingga, jika perpustakaan memiliki koleksi bahan pustaka yang dilindungi oleh hak cipta, perpustakaan harus memastikan bahwa kepemilikan dan penggunaan bahan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik dari instansi pemerintah atau badan publik lainnya, termasuk informasi yang disimpan dalam perpustakaan. Dalam hal ini, perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia wajib memberikan akses informasi yang dimiliki kepada siapa saja yang membutuhkannya.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perpustakaan Perguruan Tinggi. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi, termasuk tata cara pengadaan, pemeliharaan, dan penyimpanan koleksi bahan pustaka. Perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia harus mematuhi peraturan ini untuk menjaga koleksi bahan pustaka agar tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan dengan baik.
4. Peraturan Rektor Universitas Sari Mutiara Indonesia tentang Kepustakaan. Peraturan ini merupakan pedoman internal Universitas Sari Mutiara Indonesia dalam pengelolaan perpustakaan. Dalam peraturan ini, diatur tata cara pengadaan, pemeliharaan, dan penyimpanan koleksi bahan pustaka, serta hak dan kewajiban pengguna perpustakaan. Perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia wajib mematuhi peraturan ini sebagai bagiandari kebijakan internal universitas.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal universitas, diharapkan perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia dapat menjaga dan memanfaatkan koleksi bahan pustaka dengan baik, serta memberikan akses informasi kepadamasyarakat dengan adil.

Privasi pengguna dalam pengelolaan informasi di Perpustakaan USM Indonesia

Sebagai sebuah perpustakaan universitas, Perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi privasi pengguna dalam pengelolaan informasi. Hal ini penting dilakukan agar pengguna merasa aman dan nyaman dalam menggunakan layanan perpustakaan, serta untuk menjaga kepercayaan dan integritas institusi perpustakaan. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia untuk menjaga privasi pengguna antara lain:

1. Menggunakan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data pengguna, seperti enkripsi dan firewall.
2. Meminta izin kepada pengguna sebelum mengumpulkan, menyimpan, atau menggunakan data pribadi mereka.
3. Menggunakan data pengguna hanya untuk tujuan tertentu, seperti untuk keperluan administrasi perpustakaan atau untuk memberikan layanan kepada pengguna.
4. Menjaga kerahasiaan data pengguna dan tidak membagikannya kepada pihak lain tanpa izin pengguna, kecuali jika diwajibkan oleh hukum atau peraturan.
5. Menghapus data pengguna yang tidak diperlukan lagi atau jika pengguna meminta untuk dihapus.
6. Memberikan akses terbatas kepada data pengguna hanya kepada staf perpustakaan yang membutuhkan informasi tersebut untuk menjalankan tugasnya.
7. Menedukasi pengguna tentang pentingnya privasi dan keamanan data serta bagaimana mengelola informasi pribadi mereka.

Dengan menjaga privasi pengguna, Perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia dapat membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan pengguna, serta menjaga citra baik institusi perpustakaan.

Kebijakan keamanan informasi dalam pengelolaan informasi di Perpustakaan USM Indonesia

Kebijakan keamanan informasi sangat penting dalam pengelolaan informasi di Perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia. Berikut adalah beberapa kebijakan keamanan informasi yang dapat diterapkan di perpustakaan tersebut:

1. Penetapan Hak Akses: Perpustakaan harus memastikan bahwa setiap pegawai memiliki hak akses yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam hal ini, perpustakaan harus menetapkan tingkat akses yang berbeda untuk setiap jenis pengguna yang memerlukan akses ke dalam sistem.
2. Proteksi Data: Perpustakaan harus melindungi data dan informasi pengguna dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan menyediakan alat keamanan yang memadai untuk mencegah penggunaan yang tidak sah.
3. Penggunaan Password: Perpustakaan harus memastikan bahwa pengguna menggunakan kata sandi yang kuat untuk melindungi informasi sensitif. Hal ini dapat dilakukan dengan memerintahkan pengguna untuk mengganti kata sandi secara berkala, serta membatasi jumlah percobaan yang salah dalam login.
4. Backup Data: Perpustakaan harus membuat cadangan data secara teratur untuk memastikan bahwa informasi penting dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan data.
5. Kebijakan Penggunaan Internet: Perpustakaan harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai penggunaan internet, dan harus memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
6. Proteksi Fisik: Perpustakaan harus memastikan bahwa perangkat keras dan media penyimpanan informasi secara fisik aman dari pencurian, kehilangan, atau kerusakan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan kunci dan perlindungan fisik lainnya seperti brankas.
7. Pelatihan Karyawan: Perpustakaan harus menyediakan pelatihan keamanan informasi secara berkala untuk karyawan dan memastikan bahwa mereka memahami pentingnya keamanan informasi dan prosedur keamanan yang harus diikuti.

Dengan menerapkan kebijakan keamanan informasi tersebut, Perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia dapat memastikan bahwa informasi pengguna terlindungi dengan baik dan diakses oleh orang yang berhak.

Strategi perpustakaan dalam menghadapi isu hukum terkait informasi USM Indonesia

Perpustakaan memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dan menyediakan akses ke informasi. Dalam menghadapi isu hukum terkait informasi, perpustakaan harus

mengambil strategi yang tepat agar dapat memenuhi tanggung jawabnya dengan baik. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diambil oleh perpustakaan dalam menghadapi isu hukum terkait informasi:

1. Memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas: Perpustakaan harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dan terstruktur dengan baik mengenai pengumpulan, pengelolaan, dan penyebaran informasi. Kebijakan ini harus mencakup hal-hal seperti privasi dan keamanan informasi, hak cipta, dan akses terhadap informasi yang terkait dengan isu hukum.
2. Melakukan pelatihan kepada karyawan: Pelatihan harus diberikan kepada karyawan perpustakaan tentang berbagai aspek hukum terkait informasi, termasuk hak cipta, privasi, dan perlindungan data. Hal ini dapat membantu karyawan dalam menangani situasi yang kompleks dan meminimalkan risiko hukum.
3. Melakukan audit secara rutin: Perpustakaan harus melakukan audit secara rutin untuk memastikan bahwa sistem dan prosedur yang diimplementasikan sesuai dengan kebijakan dan hukum terbaru. Audit ini harus mencakup aspek keamanan, privasi, dan hak cipta.
4. Menjalin kemitraan dengan institusi hukum: Perpustakaan dapat menjalin kemitraan dengan institusi hukum untuk memperoleh saran dan dukungan dalam menangani isu hukum terkait informasi. Hal ini dapat membantu perpustakaan dalam mengambil keputusan yang tepat dan memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Memberikan edukasi kepada pengguna: Perpustakaan harus memberikan edukasi kepada pengguna tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam menggunakan informasi yang disediakan oleh perpustakaan. Hal ini dapat membantu pengguna untuk menghindari tindakan yang melanggar hukum dan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya menghormati hak cipta dan privasi.

Dengan mengambil strategi-strategi di atas, perpustakaan dapat meminimalkan risiko hukum terkait informasi dan memastikan bahwa tugas utama mereka untuk menyediakan akses ke informasi dapat dilakukan dengan baik dan memenuhi standar yang tinggi.

METODE

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam penelitiannya tidak diperlukan hipotesis. Menurut teori Sugiyono metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, serta menentukan apa yang dilakukan dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman informan untuk menetapkan rencana dan keputusan yang akan datang. Penelitian deskriptif kualitatif dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan, mengevaluasi praktek-praktek yang berlaku, dan menentukan solusi atau rekomendasi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan mempelajari pengalaman informan, penulis dapat menghasilkan rencana atau keputusan yang lebih baik di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan perpustakaan terkait penggunaan dan akses informasi USM Indonesia

Kebijakan perpustakaan terkait penggunaan dan akses informasi merupakan suatu hal yang penting dalam menjamin ketersediaan dan akses informasi secara luas bagi masyarakat. Kebijakan ini mencakup beberapa aspek penting seperti hak cipta, privasi, keamanan informasi, dan juga etika penggunaan informasi. Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan mengenai beberapa aspek penting dalam kebijakan perpustakaan terkait penggunaan dan akses informasi.

Pertama-tama, hak cipta merupakan hal yang sangat penting dalam kebijakan perpustakaan terkait penggunaan dan akses informasi. Perpustakaan harus memperhatikan hak cipta dari materi yang diakses oleh pengguna. Hak cipta harus dilindungi, namun juga harus memperhatikan hak pengguna dalam menggunakan materi yang telah dilindungi hak cipta tersebut. Dalam hal ini, perpustakaan dapat memberikan akses ke materi yang dilindungi hak cipta dengan cara yang sah, seperti dengan memberikan akses terbatas, pembelian lisensi, atau dengan meminta izin dari pemilik hak cipta.

Kedua, privasi juga menjadi hal yang penting dalam kebijakan perpustakaan terkait penggunaan dan akses informasi. Perpustakaan harus memastikan bahwa informasi pribadi pengguna terlindungi dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Perpustakaan dapat mengambil tindakan untuk melindungi privasi pengguna dengan cara seperti mengenkripsi data, mengamankan akses ke data pribadi, atau dengan menghapus data pribadi secara teratur.

Ketiga, keamanan informasi juga menjadi hal yang penting dalam kebijakan perpustakaan terkait penggunaan dan akses informasi. Perpustakaan harus memastikan bahwa informasi yang tersedia aman dari tindakan kejahatan seperti pencurian data atau serangan siber. Perpustakaan harus memiliki tindakan keamanan yang memadai, seperti sistem keamanan jaringan dan enkripsi data untuk melindungi informasi dari akses tidak sah. Terakhir, etika penggunaan informasi juga menjadi hal yang penting dalam kebijakan perpustakaan terkait penggunaan dan akses informasi. Pengguna harus mematuhi etika penggunaan informasi, seperti tidak melakukan plagiarisme atau penyebaran informasi palsu. Perpustakaan harus memberikan panduan etika penggunaan informasi kepada pengguna, dan mengambil tindakan jika ada pelanggaran etika penggunaan informasi (Pattah.2014).

Secara keseluruhan, kebijakan perpustakaan terkait penggunaan dan akses informasi sangat penting dalam menjamin ketersediaan dan akses informasi secara luas bagi masyarakat. Kebijakan ini harus mencakup beberapa aspek penting seperti hak cipta, privasi, keamanan informasi, dan juga etika penggunaan informasi. Perpustakaan harus memperhatikan hal-hal tersebut dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan perpustakaan terkait penggunaan dan akses informasi agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pengguna.

Perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual USM Indonesia

Perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual adalah aspek penting dalam dunia bisnis dan industri. Hal ini terutama karena hak cipta dan kekayaan intelektual memberikan hak eksklusif kepada pemilik karya intelektual untuk mengontrol penggunaan dan distribusinya. Dalam tulisan ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang hak cipta dan kekayaan intelektual, mengapa perlindungan ini penting, bagaimana perlindungan ini dilakukan, serta dampaknya pada berbagai sektor industri. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya untuk mengendalikan penggunaan dan distribusi karya tersebut. Ini berarti bahwa tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan karya tersebut tanpa izin dari pencipta. Dalam pengertian yang lebih luas, hak cipta mencakup hak untuk membuat salinan, mendistribusikan, menjual, dan menampilkan karya tersebut.

Kekayaan intelektual mencakup seluruh jenis kekayaan yang bersifat intelektual, seperti paten, merek dagang, rahasia dagang, dan hak cipta. Paten memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk mencegah orang lain membuat, menggunakan, menjual atau mendistribusikan produk atau proses yang menggunakan penemuan tersebut tanpa izin. Merek dagang, di sisi lain, memberikan hak kepada pemiliknya untuk melindungi nama, logo, atau tanda terdaftar yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau jasa tertentu. Perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual penting bagi para pemilik bisnis dan pencipta karya intelektual karena memberikan hak eksklusif atas penggunaan dan distribusi karya tersebut. Dengan demikian, pemilik karya intelektual dapat melindungi hak-hak mereka dari penyalahgunaan dan penggunaan tanpa izin. Perlindungan hak cipta dan

kekayaan intelektual juga mendorong inovasi dan kreativitas, karena memberikan insentif bagi para pencipta untuk terus mengembangkan produk atau karya yang baru.

Sistem perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual berbeda-beda di setiap negara, namun secara umum terdapat peraturan internasional yang mengatur hak cipta dan kekayaan intelektual, seperti Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni dan Perjanjian TRIPS (Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights) dari Organisasi Perdagangan Dunia. Dalam sebagian besar negara, hak cipta dan kekayaan intelektual diatur oleh undang-undang hak cipta dan paten, yang menetapkan prosedur pendaftaran dan perlindungan. Dalam era digital saat ini, hak cipta dan kekayaan intelektual menjadi semakin penting. Teknologi digital memudahkan pengiriman, distribusi, dan reproduksi karya-karya intelektual, sehingga mempercepat pengembangan dan distribusi informasi. Namun, teknologi digital juga memudahkan penyalahgunaan hak cipta dan kekayaan intelektual, seperti pembajakan dan penggunaan tanpa izin. Oleh karena itu, undang-undang hak cipta dan kekayaan intelektual harus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi digital.

Perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual memiliki dampak yang signifikan pada berbagai sektor industri. Dalam industri musik, misalnya, hak cipta sangat penting bagi para artis dan produsen rekaman, karena memberikan hak eksklusif atas produksi dan distribusi musik. Industri film dan televisi juga sangat bergantung pada hak cipta dan kekayaan intelektual untuk melindungi hak eksklusif atas produksi dan distribusi film dan program televisi. Begitu pula dalam industri teknologi, hak paten memberikan insentif bagi para pengembang teknologi untuk mengembangkan produk atau proses yang inovatif dan baru. Namun, perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual juga dapat menjadi kontroversial, terutama ketika hak-hak tersebut digunakan untuk mencegah inovasi atau untuk membatasi akses masyarakat terhadap produk atau layanan tertentu. Misalnya, para kritikus telah mengkritik praktik perusahaan farmasi yang mematenkan obat-obatan yang vital untuk kesehatan masyarakat, karena dapat membatasi akses masyarakat terhadap obat-obatan tersebut.

Selain itu, masalah kekayaan intelektual juga dapat menjadi sumber konflik internasional. Negara-negara berkembang sering kali mengkritik sistem perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual yang diterapkan oleh negara-negara maju, karena dapat membatasi akses mereka terhadap teknologi dan produk tertentu. Dalam rangka memastikan perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual yang efektif, perlu ada keseimbangan antara hak-hak pemilik karya intelektual dan hak-hak konsumen dan masyarakat. Perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual harus menghormati hak-hak masyarakat untuk akses terhadap informasi dan teknologi yang penting bagi kebutuhan sehari-hari mereka.

Pertanggungjawaban hukum perpustakaan USM Indonesia

Perpustakaan adalah suatu lembaga yang mempunyai fungsi penting dalam masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan dan sumber informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, perpustakaan harus memperhatikan aspek hukum karena perpustakaan sebagai institusi publik harus memenuhi kewajiban hukum dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya. Pertanggungjawaban hukum perpustakaan dapat dibagi menjadi beberapa aspek, diantaranya adalah tanggung jawab hukum perpustakaan terhadap koleksi, pengunjung, dan pihak ketiga (Abdullah, 2016).

Pertama-tama, perpustakaan memiliki tanggung jawab hukum terhadap koleksi yang dimilikinya. Tanggung jawab ini meliputi kewajiban untuk memperoleh koleksi secara legal, menyimpan koleksi dengan baik dan aman, dan menghindari melakukan pelanggaran hak cipta atau penyalahgunaan materi yang terdapat dalam koleksi. Jika perpustakaan melanggar hak cipta atau melakukan penyalahgunaan terhadap materi yang terdapat dalam koleksinya, maka perpustakaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, perpustakaan juga memiliki tanggung jawab hukum terhadap pengunjung. Perpustakaan

harus memastikan bahwa pengunjungnya mendapatkan akses yang mudah dan adil terhadap koleksi yang ada, memperoleh pelayanan yang baik dan ramah, dan aman dari bahaya yang mungkin terjadi di dalam perpustakaan. Jika terjadi kerugian atau kecelakaan pada pengunjung dalam lingkungan perpustakaan, maka perpustakaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, perpustakaan juga memiliki tanggungjawab hukum terhadap pihak ketiga. Tanggungjawab ini meliputi kewajiban untuk memastikan bahwa perpustakaan tidak menimbulkan kerugian atau masalah hukum pada pihak ketiga seperti penerbit atau penulis. Perpustakaan harus memperoleh izin atau persetujuan dari pihak yang berkepentingan sebelum menggunakan materi yang terdapat dalam koleksi. Jika perpustakaan melakukan pelanggaran atau penggunaan materi tanpa izin, maka perpustakaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka meminimalisir terjadinya masalah hukum, perpustakaan perlu mengambil tindakan preventif seperti membuat peraturan-peraturan yang jelas terkait dengan penggunaan koleksi, mengedukasi pengunjung tentang hak cipta dan kewajiban penggunaan koleksi, dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap infrastruktur dan lingkungan perpustakaan agar aman dan nyaman bagi pengunjung. Selain itu, perpustakaan juga dapat mengambil tindakan preventif dengan melakukan pelatihan dan pengembangan SDM kepada staf perpustakaan tentang hukum dan etika dalam pengelolaan perpustakaan. Hal ini akan membantu staf perpustakaan untuk menghindari melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum dalam menjalankan tugasnya.

Apabila terjadi masalah hukum yang melibatkan perpustakaan, maka perpustakaan perlu mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu tindakan yang dapat diambil adalah melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang seperti pengacara atau lembaga hukum yang dapat memberikan bantuan dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi oleh perpustakaan. Selain itu, perpustakaan juga perlu mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti peraturan perundang-undangan, dokumen perizinan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan. Hal ini akan mempermudah perpustakaan dalam memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masalah hukum yang dihadapinya.

Dalam hal tanggungjawab hukum, perpustakaan juga perlu memperhatikan aspek asuransi. Perpustakaan dapat membeli asuransi untuk melindungi diri dari risiko kecelakaan atau kerusakan pada koleksi perpustakaan. Asuransi juga dapat memberikan perlindungan terhadap gugatan hukum yang diarahkan pada perpustakaan. Dalam kesimpulannya, perpustakaan sebagai institusi publik harus memperhatikan tanggungjawab hukumnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perpustakaan perlu memperhatikan tanggungjawab hukum terhadap koleksi, pengunjung, dan pihak ketiga serta mengambil tindakan preventif untuk menghindari terjadinya masalah hukum. Jika terjadi masalah hukum, perpustakaan perlu mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk menyelesaikannya serta memperhatikan aspek asuransi sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap risiko hukum.

Penggunaan teknologi informasi di perpustakaan USM Indonesia

Teknologi informasi memainkan peran yang sangat penting dalam mengelola perpustakaan modern. Dalam era digital seperti sekarang, perpustakaan tidak lagi hanya berisi koleksi buku dan majalah fisik, tetapi juga meliputi sumber daya digital seperti ebook, jurnal online, dan basis data. Teknologi informasi memungkinkan pengelolaan perpustakaan menjadi lebih efektif, efisien, dan ramah pengguna. Dalam artikel ini, kita akan membahas penggunaan teknologi informasi di perpustakaan dan manfaat yang diberikan (Hartono, 2017).

Pertama-tama, salah satu aplikasi teknologi informasi yang paling penting di perpustakaan adalah sistem manajemen perpustakaan. Sistem ini memungkinkan perpustakaan untuk mengelola semua aspek pengelolaan koleksi buku dan sumber daya

lainnya, mulai dari peminjaman dan pengembalian, pencarian dan pemesanan, hingga pemeliharaan dan pengembangan koleksi. Sistem manajemen perpustakaan modern biasanya terintegrasi dengan perangkat lunak basis data yang memungkinkan pengguna untuk mencari buku dan sumber daya lainnya secara online dan memberikan informasi terkait seperti status ketersediaan dan lokasi buku. Salah satu manfaat utama dari sistem manajemen perpustakaan adalah meningkatkan efisiensi operasional perpustakaan. Dengan sistem manajemen yang terintegrasi, staf perpustakaan dapat mengelola koleksi secara lebih efisien, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi biaya administrasi. Sistem manajemen perpustakaan juga memungkinkan perpustakaan untuk memonitor permintaan pengguna dan memperbarui koleksi sesuai dengan kebutuhan.

Selain sistem manajemen perpustakaan, teknologi informasi juga memungkinkan perpustakaan untuk memperluas jangkauan layanannya melalui layanan online. Misalnya, banyak perpustakaan menawarkan akses online ke sumber daya digital seperti ebook, jurnal online, dan basis data. Pengguna dapat mengakses sumber daya ini melalui portal perpustakaan, yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja selama pengguna memiliki koneksi internet. Manfaat dari layanan online ini sangat beragam. Pertama, layanan online memungkinkan perpustakaan untuk menjangkau pengguna yang berada di luar kota atau bahkan negara, sehingga memperluas jangkauan perpustakaan secara signifikan. Selain itu, layanan online memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya kapan saja, sehingga memudahkan pengguna untuk memperoleh informasi tanpa harus datang ke perpustakaan fisik (Mansur, 2005).

Teknologi informasi juga memungkinkan perpustakaan untuk menyediakan layanan peminjaman buku online. Dalam model ini, pengguna dapat memilih buku yang ingin dipinjam melalui portal perpustakaan, dan buku akan dikirimkan ke alamat pengguna. Layanan ini memberikan kemudahan bagi pengguna yang memiliki keterbatasan waktu atau kesulitan dalam mengunjungi perpustakaan fisik, seperti orang yang sedang sibuk bekerja atau mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Selain itu, teknologi informasi juga dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan melalui penggunaan teknologi seperti RFID (Radio Frequency Identification) dan self-checkout machines. RFID memungkinkan perpustakaan untuk mengelola koleksi dengan lebih efisien dan akurat, sementara self-checkout machines memungkinkan pengguna untuk meminjam dan mengembalikan buku secara mandiri tanpa bantuan staf perpustakaan.

Manfaat lain dari teknologi informasi di perpustakaan adalah kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pengguna. Data ini dapat digunakan untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna, sehingga perpustakaan dapat memperbarui koleksi dan layanan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, data ini juga dapat digunakan untuk mengukur efektivitas layanan perpustakaan dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Namun, penggunaan teknologi informasi di perpustakaan juga memiliki beberapa tantangan. Pertama-tama, biaya implementasi dan pemeliharaan teknologi informasi dapat menjadi mahal, terutama untuk perpustakaan kecil yang memiliki anggaran terbatas. Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga memerlukan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih untuk mengelola sistem, mengoperasikan perangkat, dan memberikan dukungan teknis.

Selain tantangan biaya dan SDM, penggunaan teknologi informasi di perpustakaan juga dapat menimbulkan masalah privasi dan keamanan data. Karena perpustakaan mengumpulkan data pribadi pengguna, seperti nama, alamat, dan nomor telepon, perpustakaan perlu memastikan bahwa data tersebut aman dan dilindungi dari akses tidak sah atau pelanggaran privasi. Dalam kesimpulannya, penggunaan teknologi informasi di perpustakaan adalah penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas layanan, dan memperbarui koleksi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Namun, penggunaan teknologi informasi juga memerlukan biaya dan SDM yang cukup, serta perhatian khusus terhadap masalah privasi dan keamanan data. Dengan manajemen yang baik dan penggunaan teknologi yang tepat,

perpustakaan dapat memperkuat posisinya sebagai pusat informasi dan pendidikan yang penting bagi masyarakat.

SIMPULAN

Perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disediakan untuk penggunaannya telah sesuai dengan aspek hukum yang berlaku. Hal ini mencakup hak cipta, privasi, dan keamanan informasi. Oleh karena itu, perpustakaan perlu memperhatikan dengan baik sumber informasi yang digunakan, serta memastikan bahwa penggunaannya tidak melanggar hak cipta atau privasi pihak lain. Selain itu, perpustakaan juga harus memastikan bahwa sistem keamanan informasi yang digunakan cukup baik untuk melindungi informasi dari tindakan yang tidak sah, seperti pencurian data atau peretasan. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum terkait informasi, perpustakaan perlu bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bekerja sama dengan pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan efektif. Dengan memperhatikan aspek hukum dalam pengelolaan informasi, perpustakaan dapat menjaga kredibilitasnya dan memberikan layanan yang berkualitas kepada pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J., & Qodin, N. (2016). Aspek hukum penggunaan teknologi informasi dalam wakaf uang di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2), 1-20.
- Arum, A. P., & Marfianti, Y. (2021). Pengembangan perpustakaan digital untuk mempermudah akses informasi. *Information Science and Library*, 2(2), 92-100.
- Hartono, H. (2017). Strategi pengembangan perpustakaan digital dalam membangun aksesibilitas informasi: Sebuah kajian teoritis pada Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. *UNILIB: Jurnal Perpustakaan*, 77-91.
- Hia, N., & Ginting, S. (2018). Pengaruh Internet Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia Kota Medan. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 2(1), 61-77.
- Mansur, D. M. A. (2005). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Tiga Serangkai.
- Pattah, S. H. (2014). Literasi informasi: peningkatan kompetensi informasi dalam proses pembelajaran. *Khizanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 2(2), 108-119.